

ABSTRAK

PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 VAKSINASI COVID-19 TAHUN 2021 DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

Sinta Cempaka

Guna memastikan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* di kelola sesuai prosedur, Lembaga Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pengawasan berbentuk pencegahan maladministrasi disejumlah daerah. Di Provinsi Lampung, pengawasan pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* dilakukan oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil dan kendala pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap pengelolaan limbah B3 vaksinasi *Covid-19* tahun 2021 di Provinsi Lampung. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Fokus pada penelitian ini adalah indikator pengawasan efektif menurut T.Handoko dalam Sulistio yang terdiri dari 10 indikator yakni, akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk, diterima para anggota organisasi. Selanjutnya fokus penelitian ini untuk melihat kendala yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam melakukan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan 6 dari 10 indikator pengawasan efektif terpenuhi yakni, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, bersifat sebagai petunjuk, diterima para anggota organisasi. Dan 4 indikator yang belum terpenuhi yakni akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh dan fleksibel. Tidak terpenuhinya 4 indikator tersebut disebabkan oleh kendala yang dihadapi Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam proses pengawasan, baik kendala internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Pengawasan, Ombudsman, *Covid-19*

ABSTRACT

OMBUDSMAN SUPERVISION OF 2021 COVID-19 VACCINATION B3 WASTE MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE

By :

Sinta Cempaka

In order to ensure that B3 waste from Covid-19 vaccination is managed according to procedures, the Ombudsman Institution, as the supervisory body for the implementation of public services, carries out supervision in the form of preventing maladministration in a number of regions. In Lampung Province, supervision of the management of the Covid-19 vaccination B3 waste is carried out by the Indonesian Ombudsman Institute for the Lampung Representative. The aim of this research is to determine the results and obstacles to supervision carried out by the Indonesian Ombudsman Institution, Lampung Representative, regarding the management of B3 waste for the Covid-19 vaccination in 2021 in Lampung Province. The research data was obtained from primary and secondary data using descriptive research methods. The focus of this research is indicators of effective supervision according to T.Handoko in Sulistio which consists of 10 indicators, namely, accurate, timely, objective and comprehensive, centered on strategic monitoring points, economically realistic, organizationally realistic, coordinated with organizational flow, flexible, is as a guide, accepted by members of the organization. Furthermore, the focus of this research is to look at the obstacles faced by the Lampung Representative of the Republic of Indonesia Ombudsman Institution in conducting supervision. The research results showed that 6 out of 10 indicators of effective supervision were met, namely, focused on strategic supervision points, economically realistic, organizationally realistic, coordinated with organizational flow, acting as a guide, accepted by members of the organization. And the 4 indicators that have not been met are accurate, timely, objective, comprehensive and flexible. The failure to fulfill these 4 indicators was caused by obstacles faced by the Indonesian Ombudsman Institution, Lampung Representative, in the supervision process, both internal and external.

Keywords: Supervision, Ombudsman, Covid-19